**KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE PADA RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (RTBL KSK) KUTAI TIMUR**

**Bulan**

**NPM. 16.11.1001.3509.125**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan ini untuk mengetahui Kapabilitas Dynamic Governance aspek thinking ahead, aspek thinking, dan thinking across pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten (RTBL KSK) Kutai Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dengan melakukan pengumpulan yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek thinking ahead menunjukkan bahwa hal yang perlu diantisipasi adalah perkembangan yang tidak terkendali pada kawasan strategis maupun kawasan disekitarnya dan juga perkembangan/perilaku negatif akibat perkembangan wilayah. Sejumlah catatan antara lain opsi strategi pengendalian rencana di atur melalui rencana kelembagaan yang mencantumkan organisasi pelaksana, dan SDM yang terlibat jadi kedua opsi strategi ini dapat menjadi bagian pengendalian RTBL.Aspek thinking again menunjukkan bahwa Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam tata ruang.

Kata Kunci: Kapabilitas Dynamic Governance, Lingkungan, Bangunan.

***DYNAMIC GOVERNANCE CAPABILITY IN THE BUILDING AND ENVIRONMENTAL PLAN IN THE STRATEGIC AREA OF KABUPATEN (RTBL KSK) TIMUR KUTAI***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the Capability of Dynamic Governance aspects of thinking ahead, aspects of thinking, and thinking across the Building and Environmental Planning in the Regency Strategic Area (RTBL KSK) East Kutai. The research method used is a qualitative approach to the type of descriptive research by collecting obtained through observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the thinking ahead aspect showed that the things that needed to be anticipated were uncontrolled developments in the strategic area and the surrounding area and also the development / negative behavior due to regional development. A number of notes include the plan control strategy options arranged through an institutional plan that lists the implementing organization, and the human resources involved so these two strategy options can be part of RTBL control. The thinking again aspect shows that the SEA document cannot be understood as a standard rule, but rather as a direction for choosing alternative uses that suit your needs. SEA is a form of strategic action in guiding, directing, and guaranteeing negative effects on the environment and sustainability considered in spatial planning.*

*Keywords: Capability of Dynamic Governance, Environment, Buildings.*

**PENDAHULUAN**

Pentingnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dibuat untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, peningkatan produktivitas dan menciptakan keharmonisan antar lingkungan alam. Secara umum mengalami perkembangan cukup pesat pada kawasan perkotaannya, namun di sisi lain sebagai issue berkembang, masih adanya potensi sumberdaya alam yang belum termanfaatkan secara optimal, sehingga belum dapat mendukung upaya pengembangan wilayah secara maksimal (Wirosoedarmo dkk, 2014).

Berbagai bagian penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan menurut besarannya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, dan kawasan megapolitan. Penataan ruang kawasan metropolitan dan kawasan megapolitan. Sementara penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan. Penataan ruang haruslah memperhatikan fungsi ruang dan ini dapat diatur dengan RTRW masing-masing Kabupaten atau Kota.

Untuk penyusunan RTRW Kabupaten Kutai Timur 2012-2032 dilaksanakan berdasarkan hasil kajian dengan melihat dan mengindikasi perubahan ruang sebagai refleksi dari dinamika kegiatan pemanfaatan ruang wilayah dengan substansi aturan tata ruang pada Undang-Undang nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang sehingga penyusunan RTRW 2012-2032 di Kabupaten Kutai Timur ini sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi yang tidak menguntungkan. Sebagai contoh stagnannya pembangunan, tidak teraturnya bentuk dan struktur wilayah, tidak meratanya alokasi investasi yang mendorong munculnya dikotomi kawasan pusat dan pinggiran, penyebaran fasilitas pelayanan yang tidak merata berdasarkan fungsi-fungsi ruang yang telah ditetapkan serta konflik pemanfaatan lahan dan ilegal konversi.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Timur (RTBL KSK) memperhatikan kebijakan pemerintah daerah berkaitan usulan penyediaan kawasan-kawasan strategis antara lain enclave Taman Nasional Kutai (TNK). Kemudian program ini juga memperhatikan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya non kehutanan (KBNK) dan Hutan Lindung. Selain itu Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan mesti tetap memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi.

Penelitian Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten Kutai Timur (RTBL KSK) dikaitkan dengan teori Kapabilitas Dynamic Governance yang merupakan bagian dari konsep Dynamic Governance Siong & Geraldine (2007) meskipun terdapat penelitian terdahulu yang membahas Kapabilitas Dynamic Governance seperti penelitian Tahir & Nahruddin, (2017) yang membahas kapabilitas dynamic governance dalam optimalisasi pengelolaan lahan terbuka hijau namun penelitian ini memiliki subyek yang berbeda, penelitian saat ini lebih banyak membahas Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis dan juga lokus penelitian yang berbeda, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kutai Timur dengan penekanan teori dynamic capabilities (mencakup kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across).

Berdasarkan penjelasan dan permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik mengangkat sebuah judul skripsi dengan judul “Kapabilitas Dynamic Governance Pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten (RTBL KSK) Kutai Timur”.

**KERANGKA KONSEP DAN TEORI**

**Konsep Dynamic Governance**

Dynamic governance merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang diterapkan oleh pemerintah Negara Singapura yang mampu membawa mereka menuju pada sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. Sebagaimana tujuan pelayanan publik yang ingin dicapai oleh reformasi birokrasi Indonesia, maka konsep dynamic governance menjadi acuan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat (Pajri, 2018).

Dynamic governance hanya menekankan dua kunci penting yaitu kapasitas dan kultur. Dua kunci penting inilah yang mengerakkan sumberdaya manusia dan proses menuju perubahan kebijakan yang adiktif atau yang dicita-citakan sebagai dynamic governance (Kasim, dkk, 2015).

Institusi yang dinamis dapat meningkatkan pembangunan dan kemakmuran suatu negara dengan terus-menerus memperbaiki dan mengadaptasi lingkungan sosial-ekonomi tempat orang, bisnis, dan pemerintah berinteraksi. Mereka memengaruhi perkembangan ekonomi dan perilaku sosial melalui kebijakan, aturan, dan struktur yang menciptakan insentif atau hambatan untuk berbagai kegiatan. Tata pemerintahan yang dinamis adalah kunci keberhasilan di dunia yang mengalami percepatan globalisasi dan kemajuan teknologi yang tak henti-hentinya (Siong & Geraldine, 2007).

Tata kelola yang dinamis akan mendukung terciptanya good governance dan clean governance dalam penyelenggaran pemerintahan (Junaedi, 2020).

**Kapabilitas Dynamic Governance**

Aspek capabilitas mencerminkan bagaimana pola pikir orang singapura atas dasar tiga hal yaitu thinking ahead, thinking again dan thinking across. Thinking ahead menunjukkan kapasitas berpikir dalam merumuskan kondisi dimasa mendatang yang mungkin dapat berdampak pada kondisi dalam negeri. Sebaliknya, thinking again akan merefleksikan kemampuan dan keterbukaan untuk berkaca pada kebijakan sebelumnya, kemudian dievaluasi dan disempurnakan untuk memaksimalisasi pencapaian tujuan. Sementara, thinking across merupakan kemampuan dan keterbukaan wawasan dalam mempelajari pengalaman ide dan konsep actor-aktor lain (Tahir & Nahrudin, 2017). Untuk lebih jelasnya mengenai berfikir ke depan (thinking ahead), berpikir lagi (thinking again), dan berpikir lintas batas (thinking across).

**Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan**

Perencanaan Tata Bangunan dan Lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan. Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru. Menurut Tanuwidjaja (2010:12-13) kondisi saat ini diperlukan perencanaan Tata Ruang Komprehensif berbasis Ekologis untuk memecahkan masalah-masalah umum tata ruang

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, dan Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur. Adapun subyek penelitian ini terdiri dari Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur. Kepala Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu :Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

**HASIL PENELITIAN**

**Kapabilitas Dynamic Governance aspek thinking**

Setiap kecenderungan dan perkembangan masa depan yang mungkin memiliki dampak signifikan pada tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa RTBL memiliki fungsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlukan pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan atau kawasan hal yang menjadi penting dari RTBL ini adalah keberadaan wilayah kabupaten Kutai Timur yang sangat luas dan belum tertata dengan baik dan rapi terutama yang di kecamatan-kecamatan.

Perbaikan tata kelola lingkungan perlu diperhatikan agar tercipta lingkungan yang mendukung lokasi kerja yang baik dalam tata letak dan fungsi (Narethong, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perkembangan kawasan strategis memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan sehingga kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan potensial sangat dipertimbangkan dalam rangka memaksimalkan potensi kegiatan mengingat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy merupakan peruntukan untuk kawasan industri. Kemudian hal yang perlu diantisipasi adalah perkembangan yang tidak terkendali pada kawasan strategis maupun kawasan disekitarnya dan juga perkembangan/perilaku negatif akibat perkembangan wilayah.

Pemahaman pencapaian tujuan, yaitu memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji efektivitas strategi, kebijakan dan program yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemahaman pencapaian tujuan dimulai dari pemahaman tentang perencanaan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis dan wilayah sekitarnya selain itu juga pemahaman tentang pentingnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman kawasan

Opsi strategi terkait dengan apa yang dapat digunakan untuk mempersiapkan munculnya ancaman dan memanfaatkan peluang-peluang baru, dan mempengaruhi pembuat keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa opsi strategi pengendalian rencana di atur melalui rencana kelembagaan yang mencantumkan organisasi pelaksana, SDM yang terlibat jadi kedua opsi strategi ini dapat menjadi bagian pengendalian RTBL. Selanjutnya opsi strategi lain dikemukakan oleh

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa arahan RTBL.yang berpijak pada potensi karakter setempat akan dapat menciptakan bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif ke arah terwujudnya identitas lokal Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dapat dioperasikan sebagai alat pengendali, RTBL harus mempunyai jurisdiksi dan kekutan hukum. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan penataan bangunan dan lingkungan dalam RTBL harus sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Opsi strategi yang disesuaikan dengan regulasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur berfungsi untuk mempersiapkan munculnya ancaman dan memanfaatkan peluang-peluang baru, dan mempengaruhi pembuat keputusan dalam penataan RTBL.

Dapat dipahami bahwa Kapabilitas Dynamic Governance aspek thinking ahead Pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten (RTBL KSK) Kutai Timur menunjukkan bahwa RTBL memiliki fungsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlukan pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan atau kawasan hal yang menjadi penting dari RTBL ini adalah keberadaan wilayah kabupaten Kutai Timur yang sangat luas dan belum tertata dengan baik dan rapi terutama yang di kecamatan-kecamatan.

Perkembangan kawasan strategis memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan sehingga kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan kawasan potensial sangat dipertimbangkan dalam rangka memaksimalkan potensi kegiatan mengingat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy merupakan peruntukan untuk kawasan industri. Kemudian hal yang perlu diantisipasi adalah perkembangan yang tidak terkendali pada kawasan strategis maupun kawasan disekitarnya dan juga perkembangan/perilaku negatif akibat perkembangan wilayah.

Pada indikator pemahaman pencapaian tujuan menunjukkan bahwa pemahaman pencapaian tujuan dimulai dari pemahaman tentang perencanaan infrastruktur yang mendukung kawasan strategis dan wilayah sekitarnya selain itu juga pemahaman tentang pentingnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman kawasan. Namun dari indikator opsi strategi memiliki sejumlah catatan antara lain opsi strategi pengendalian rencana di atur melalui rencana kelembagaan yang mencantumkan organisasi pelaksana, SDM yang terlibat jadi kedua opsi strategi ini dapat menjadi bagian pengendalian RTBL. Arahan RTBL ini berpijak pada potensi karakter setempat akan dapat menciptakan bangunan dan lingkungan yang memberi kontribusi positif ke arah terwujudnya identitas lokal Kabupaten Kutai Timur.

**Kapabilitas Dynamic Governance aspek thinking again**

Pada variabel berfikir ke depan (thinking again) akan merefleksikan kemampuan dan keterbukaan untuk berkaca pada kebijakan sebelumnya yang berfokus pada indikator tinjauan, mendesain ulang kebijakan dan program, dan melaksanakan kebijakan sistem baru.

Tinjauan, yaitu meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan umpan balik pemahaman publik dan meneliti penyebab umpan balik atau mengamati fakta, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi target atau hilang serta meninjau strategi, kebijakan dan program untuk mengidentifikasi fitur dan kegiatan yang bekerja dengan baik dan yang tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa untuk melakukan review diperlukan suatu kajian seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan atau hutan. Aturan hukum terkait KLHS tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam tata ruang.

Pada indikator ini mendesain ulang kebijakan dan program diartikan sebagai bagian atau seluruh program sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan mereka lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dapat dipahami bahwa desain ulang kebijakan dan program diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan dan juga peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Desain bertujuan agar tercipta pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pada indikator pelaksanaan kebijakan sistem baru, yaitu pelaksanaan sistem baru yang lebih baik sehingga masyarakat dapat menikmati hasil yang bermakna. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan dengan sistem baru ini maka dilakukan wawancara dengan informan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kebijakan sistem baru yang ditempuh dalam program RTBL tidak muncul dalam rencana yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tetap pada kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06 tahun 2007 yang merupakan kebijakan lama yang belum dapat dikatakan sebagai penerimaan kebijakan baru. Secara keseluruhan Kapabilitas Dynamic Governance aspek thinking again Pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten (RTBL KSK) Kutai Timur dilihat dari indikator review menunjukkan bahwa diperlukan suatu kajian seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan atau hutan. Aturan hukum terkait KLHS tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dokumen KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan dalam tata ruang. Dari aspek mendesain ulang kebijakan menunjukkan bahwa desain ulang kebijakan dan program diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan dan juga peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Desain bertujuan agar tercipta pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan. Selanjutnya kebijakan sistem baru yang ditempuh dalam program RTBL tidak muncul dalam rencana yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Aspek thinking ahead menunjukkan bahwa RTBL memiliki fungsi dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang diperlukan pada bangunan atau kelompok bangunan pada suatu lingkungan atau kawasan hal yang menjadi penting dari RTBL ini adalah keberadaan wilayah kabupaten Kutai Timur yang sangat luas dan belum tertata dengan baik dan rapi terutama yang di kecamatan-kecamatan. Indikator opsi strategi memiliki sejumlah catatan antara lain opsi strategi pengendalian rencana di atur melalui rencana kelembagaan yang mencantumkan organisasi pelaksana, SDM yang terlibat jadi kedua opsi strategi ini dapat menjadi bagian pengendalian RTBL. Aspek thinking again Pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Kabupaten (RTBL KSK) Kutai Timur dilihat dari indikator review menunjukkan bahwa diperlukan suatu kajian seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan atau hutan. Aturan hukum terkait KLHS tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari aspek mendesain ulang kebijakan menunjukkan bahwa desain ulang kebijakan dan program diprioritaskan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan pelindungan lingkungan dan juga peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Desain bertujuan agar tercipta pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan.

**Saran**

Untuk pengendalian rencana perlu diatur melalui rencana kelembagaan perlu diperkuat dengan peningkatan SDM yang terlibat menjadi bagian pengendalian RTBL. Kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan perlu disosialisasi pada masyakarat agar mendapatkan masukan yang relevan dengan starategi yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur.

**DAFTAR PUSTAKA**

Junaedi, J. (2020). Efforts to Prevent Bureaucratic Corruption Based on the Piercing Principles of the Governance Veil in Realizing Good Governance and Clean Governance in Indonesia. Journal La Sociale, 1(2), 10-16.

Kasim, A., Huseini, M., Anwar, R., & Neo, B. S. (2015). Merekonstruksi Indonesia: sebuah perjalanan menuju dynamic governance. Penerbit Buku Kompas.

Narethong, H. (2020). Environmental Governance: Urban Waste Management Model. Journal La Lifesci, 1(2), 32-36.

Pajri, E. H. (2018). Analisis Pelayanan Publik Dalam Perspektif Dynamic Governance (Studi Tentang Kapabilitas Dinamis Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Paspor). Thesis, Universitas Airlangga.

Siong, N. B., & Geraldine, C. (2007). Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities And Change In Singapore (English Version). World Scientific.

Tahir, M. M., & Nahruddin, Z. (2017). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(1), 1-13.

Tanuwidjaja, G., Widjaya, J. M., Umum, D. P., & Indonesia, R. (2010). Integrasi tata ruang dan tata air untuk mengurangi banjir di Surabaya. Hidup dan Berkehidupan di Surabaya, 8.

Wirosoedarmo, R., Widiatmono, J. B. R., & Widyoseno, Y. (2014). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Berbasis Kemampuan Lahan. agriTECH, 34(4), 463-472.